



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : STAF AHLI MENTERI SEKRETARIS NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SARI HARJANTI**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG KOMUNIKASI POLITIK DAN KEHUMASAN**
3. NHK : **433916**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.056.269.204**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah Seluas 1650 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
3. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 96.000.000
4. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.004
5. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
6. Tanah Seluas 673 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 269.200
7. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/50 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 340.500.000**

1. MOBIL, HYUNDAI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000



3. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOBIL, MAZDA MAZDA 2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 23.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	393.349.998
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.573.982.724
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.364.101.926
III. HUTANG	Rp.	224.562.270
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.139.539.656

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.